

**KRISIS LEGITIMASI DAN REFORMASI KELEMBAGAAN
NEGARA**

Aulia Arinda Milawati¹, Anggi Kristiana Joy Panggabean², Given Teguh Farhan Ristya Pradana³, Kushwan Hadji⁴

auliaarinda19@gmail.com¹, anggikristiana019@gmail.com², givenpradana203@gmail.com³,
kuswanhadji@untidar.ac.id⁴

Universitas Tidar

Abstrak: Kelembagaan negara seharusnya berjalan dengan tugas dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan baik. Namun saat ini, Kelembagaan negara di Indonesia telah mengalami krisis legitimasi dari masyarakat karena adanya ketidakpuasan masyarakat atas kinerja lembaga negara yang tidak sesuai dengan harapan. Hal yang dapat dilakukan untuk mengurai krisis legitimasi adalah dengan melakukan reformasi kelembagaan negara, yang harapannya suatu lembaga negara dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga meningkatkan kepercayaan publik seperti sebelumnya.

Kata Kunci: Kelembagaan Negara, Krisis Legitimasi, Reformasi Kelembagaan Negara.

PENDAHULUAN

Lembaga negara merupakan entitas pemerintahan yang memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam struktur pemerintahan. Lembaga negara di Indonesia telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan. Yang singkatnya, lembaga negara berfungsi sebagai penyelenggara tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan demi mencapai tujuan negara.

Namun, dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah menghadapi berbagai tantangan yang cukup serius, salah satunya yaitu krisis legitimasi atau krisis kepercayaan. Hal ini muncul karena adanya ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintah, yang dimana pemerintah dalam hal ini gagal untuk memenuhi harapan masyarakat.

Legitimasi pada suatu kelembagaan negara juga bergantung pada kemampuan suatu lembaga negara dalam menjalankan mandatnya dengan baik dan optimal. Menurut pemikiran Jürgen Habermas, sebuah krisis legitimasi dapat timbul ketika ada suatu ketidakcocokan antara harapan masyarakat dengan realitas kebijakan yang diterapkan oleh lembaga negara. Atas dasar hal tersebut reformasi kelembagaan negara adalah suatu langkah penting untuk memperbaiki sistem dalam lembaga negara agar dalam menjalankan pemerintahan mampu berjalan dengan lebih responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat secara meluas.

Reformasi kelembagaan negara bukan hanya sekedar perubahan secara struktural, namun juga mencakup perubahan budaya dan manajemen sumber daya manusia. Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ke-19, menekankan bagaimana pentingnya untuk memiliki struktural yang adaptif dan berbasis teknologi untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dengan demikian reformasi kelembagaan negara diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan efektif, dan yang paling penting adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan negara.

KAJIAN LITERATUR

KRISIS LEGITIMASI

Krisis legitimasi merujuk pada situasi dimana kelembagaan negara kehilangan rasa kepercayaan dari masyarakat, yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kegagalan dalam memenuhi harapan masyarakat

MEKANISME PENCEGAHAN KRISIS LEGITIMASI

Untuk mencegah timbulnya krisis legitimasi adalah, lembaga-lembaga negara harus memiliki mekanisme yang baik. Contohnya, DPR harus memiliki struktur intern yang kuat dan baik supaya dapat menjaga moralitas DPR itu sendiri, dengan adanya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai penjaga “marwah politik” dan pembangun legitimasi politik DPR dengan memastikan kredibilitas dan amanahnya.

REFORMASI KELEMBAGAAN

Reformasi kelembagaan adalah langkah strategis guna memperbaiki sistem kelembagaan negara dan meningkatkan legitimasi dari masyarakat. Reformasi kelembagaan yang dapat dilakukan diantaranya yaitu, mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas politik yang dapat meningkatkan partisipasi pengawasan dari masyarakat. Selanjutnya yaitu dengan melakukan perbaikan tata kelola internal lembaga negara. Dan selanjutnya dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat membuat birokrasi berjalan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

1. Cara Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menganalisis studi kepustakaan

dari jurnal online tentang hukum kelembagaan negara, serta membaca artikel ilmiah tentang kepercayaan masyarakat kepada penerapan kebijakan kelembagaan negara. Kemudian hasil analisis di olah dalam penulisan ini oleh pemikiran penulis sendiri.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif-kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan menguraikan suatu data untuk menggambarkan secara deskriptif mengenai suatu kejadian, fenomena, atau keadaan.

PEMBAHASAN

Bagaimana krisis legitimasi berdampak pada kinerja dan efektivitas lembaga negara?

Reformasi birokrasi tidak hanya mencakup proses dan prosedur, tetapi juga melibatkan perubahan struktural, perilaku, dan sikap. Hal ini berkaitan dengan masalah ketika kekuasaan dan wewenang berbenturan. Salah satu upaya manajemen mendasar yang seharusnya menghasilkan perbaikan sistem dan struktural yang bermanfaat adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi memiliki dampak yang signifikan terhadap pemerintahan secara keseluruhan, salah satunya adalah peningkatan kredibilitas dan legitimasi, melalui reformasi birokrasi yang berhasil, pemerintah dapat meningkatkan kredibilitas, legitimasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Namun pada sisi lain perlu diingat bahwa terdapat adanya krisis legitimasi, krisis legitimasi merupakan suatu kondisi di mana kepercayaan publik terhadap lembaga negara mengalami penurunan yang signifikan. Kondisi ini dapat berdampak sangat besar terhadap kinerja dan efektivitas lembaga negara. Beberapa hal memiliki imbas dari dampak krisis legitimasi seperti penurunan kinerja lembaga negara yang dapat berkurangnya inovasi dan cenderung menurunkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh masyarakat. Selain itu, terdapat juga penurunan efektivitas lembaga negara yang antara lain adalah lembaga negara dapat sulit untuk mengambil keputusan yang tegas hingga dapat melemahkan penegakan hukum, karena masyarakat cenderung tidak percaya pada lembaga penegak hukum dan enggan melaporkan pelanggaran hukum. Dampak tersebut sering kali dijumpai pada kalangan masyarakat sipil karena dianggap kurangnya transparansi yang diberikan.

Adanya legitimasi ini juga terdapat faktor yang mempengaruhi yaitu seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, dan kurangnya transparansi yang seringkali muncul di masyarakat, masyarakat memberikan respon yang sangat signifikan terhadap transparansi negara terutama pada penegakan hukum yang akhir ini sering menjadi persoalan masyarakat.

Bagaimana peran masyarakat sipil dalam mendorong reformasi kelembagaan?

Masyarakat sipil memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong reformasi kelembagaan. Sebagai kelompok independen yang terdiri dari berbagai organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil memiliki kebebasan untuk mengorganisir diri, menyuarakan aspirasi, dan mengawasi kinerja pemerintah. Banyak kelompok profesional dan gerakan sosial berusaha membangun diri melalui gerakan sosial yang berfungsi di mana saja untuk membela dan memperjuangkan kepentingan mereka, yang didefinisikan oleh Stepan (1998).

Pada posisinya, masyarakat berperan penting pada reformasi dan dapat berperan menjadi advokasi. Masyarakat sipil berperan sebagai advokat bagi kepentingan publik. Mereka mengkampanyekan isu-isu penting seperti transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi. Melalui berbagai cara seperti demonstrasi, petisi, dan lobi, masyarakat sipil dapat menekan pemerintah untuk melakukan perubahan. Disisi lain advokasi terdapat peran yang masyarakat juga sadar akan posisi ini adalah sebagai pengawas, dimana masyarakat sipil bertindak sebagai pengawas terhadap kinerja pemerintah dan lembaga negara lainnya. Mereka memantau pelaksanaan kebijakan publik, mengidentifikasi penyimpangan, dan melaporkan kepada publik. Pada sisi lain juga,

masyarakat sipil berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dan pentingnya partisipasi dalam kehidupan politik. Mereka juga memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Jika dilihat pada peran-peran yang dipegang oleh masyarakat, pada dasarnya peran tersebut juga memiliki beberapa tantangan yang dihadapi pada masyarakat yang posisinya mendorong reformasi kelembagaan. Tantangan tersebut adalah seperti kurangnya sumber daya manusia yang berakitan dengan beberapa organisasi, banyak organisasi masyarakat sipil yang memiliki keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun SDM. Kurangnya SDM ini juga mempengaruhi beberapa kelompok masyarakat sekitar yang memiliki keterkaitan hubungan satu sama lain. Kedua adalah tekanan politik, pemerintah atau kelompok kepentingan tertentu dapat memberikan tekanan kepada organisasi masyarakat sipil yang dianggap kritis. Lalu untuk tantangan ketiga yaitu kurangnya koordinasi antar organisasi masyarakat sipil dapat melemahkan pengaruh mereka.

KESIMPULAN

Krisis legitimasi merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang konkret untuk mencegah dan mengatasi krisis legitimasi. Dengan membangun kepercayaan publik, pemerintah dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan. Masyarakat sipil merupakan pilar penting dalam proses demokratisasi dan reformasi kelembagaan. Peran mereka sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Namun, untuk mencapai tujuan reformasi, masyarakat sipil perlu terus memperkuat kapasitas mereka dan membangun kerjasama yang baik dengan berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Hadi, O. H. (2010). Peran masyarakat sipil dalam proses demokratisasi. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 14(2), 117-129.
- Muhtar, M. H. (2019). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jambura Law Review*, 1(1), 68-93.
- Mursitama, T. N. (2012). Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Mewujudkan Sistem Transparansi Nasional Pelayanan Publik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 75-91.
- Pratama, S. H. (2019). Mendorong Reformasi Parlemen Melalui Kekuatan Civil Society Di Indonesia. *Journal of Political Issues*, 1(1), 50-62.
- Septiana, A. M. (2012). Penanggulangan Krisis Legitimasi Hukum Melalui Hukum Progresif. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(4), 564-571.
- Sitepu, R. I. (2021). Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 7-14.